## SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Bupati, "Kita Targetkan Opini WTP Setiap Tahun"
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.5
Fdisi	· Selasa 31 Juli 2018

## Bupati, "Kita Targetkan Opini WTP Setiap Tahun"

## SOREANG, (GM) .-

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dua tahun berturut-furut yaitu pada tahun anggaran (TA) 2016 dan 2017, meyak inder Bupati H. Dadang M. Naser n.e. etkan opini serupa untuk Kab. Bandung pada tahun ini.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bandung TA 2017 yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) oleh Badan Anggaran (Bangar), semakin menguatkan keyakinan bupati untuk meraih target.

"Kalau ritme pola kerja samai dan per nahaman terhadan anggarar i ini dipertahankan antara DPAD dan seluruh perangkat daerah, insyaAllah tahun ini kami yakin akan kembali meraih opini WTP. Kanimunyaan ibisi, dan cita-cita untuk setiap tahunnya dapat opini WTP," ungkap Dadang di Soreang, Senin (30/7).

Menurutnya, bila setiap tahun opini positif tersebut didapat, maka Bangar tidak akan sulit dalam mengevaluasi penggunaan APBD. "Nanti Bangar tinggal melihat catatan-catatan dari BPK, tinggal melihat sarannya serperti apa untuk nantinyaditi adak lanjuti. Namun pesan saya untuk seluruh jajaran pemkab, kita jangan berpuas diri. Kare na efekti vitas dan efisiensi pengguna un angg aran, harus terus ditirgkatkan," imbuhnya.

Bupati menikai, adanya pandangan bahwa Pendapat an Asli Daerah (PAD) harus seimbang, dengan Dana Bagi Hasil (IDBH) itu baik. Namun karena dana daerah masih banyak yang ditarik ke pusat, pihaknya meminta agar dicermati bagaimana hak-hak daerah yang kebetulan damanya

ditarikke pusat.

"Misalnya Pajak
Kendaraan Bernotor (PKB) yang
ditarik pravinsi,
berapa persen
untuk PAD-nya.
Sedangkan PAD
yang sudah diserahkan ke
daerah, har us

lebih diefektifkan lagi pengawasannya. Memang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah diserahkan ke kabupaten, tinggal bagaimana mengefektifkannya. Itu nanti bekerja sama dengan DPRD," paparnya.

Sadar pajak

Dijelaskan Dadang, PBB merupakan kewajiban setiap warga negara, karena negara itu hidup dari pajak. "Saya harapkan seluruh masyarakat sadar betul untuk membayar retribusi dan pajak, karena pembangunan bisa berlangsung dengan baik manakala warganya pahamdar i sadar akan kewajibannya membay ar pajak. Dengan begitu, PAD dan APBD bisa terus meningkat," Aparaya.

Terkait industri ja riwisata, pihaknya mengaku sedang merancang dan terus melakukan pendekatan agar sektor ini bisa menjaci andalan PAD Kabupaten Bandung, "Sebab itulah kami mohon bantuan dani DPRD, agar kita juga mendapatkan pendapatan dari sektor pariv kara seperti di Kab. Bandung, Provinsi Bali. Harapannya, pariwisata bisa menjadi andalan. Namun pengelolaan saat ini belum bisa sinergis dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT Perhutani dan PTPN VIII. Lain halnya dengan perhotelan yang lebih mudah dalam pemantauannya, saat ini 10

